

ABSTRAKS

Marni: “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bekasi.”

Undang- Undang 1945 menyatakan bahwa tujuan dari kemerdekaan yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan ini dapat mengembalikan perkembangan setiap masyarakatnya, khususnya masyarakat yang masih belum mendapatkan fasilitas penempatan tenaga kerja. Kabupaten Bekasi adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia dengan tingkat kesejahteraan sosialnya yang kurang menjamin untuk masyarakatnya dikarenakan fasilitas penempatan tenaga kerja yang belum terprioritaskan secara benar. Hal ini disebabkan karena belum adanya kerjasama antara Dinas Sosial dengan Dinas Tenaga Kerja yang ada di daerah Kabupaten Bekasi. Maka dari itu implementasi kebijakan mengenai kesejahteraan ini perlu diteliti guna untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemerintah dalam peraturan daerah Kabupaten Bekasi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, hambatan pemerintah dalam pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Bekasi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan untuk mengetahui solusi pemerintah dalam menangani hambatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Model Merilee S. Grindle yang terdapat ada beberapa indicator yang digunakan dalam pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Bekasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan perda No 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bekasi Pasal 14 No 2 Poin G mengenai Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja ini dapat terlaksanakan dengan baik dengan menggunakan indicator-indicator yang terdapat dalam Teori Merilee S. Grindle, hambatan dalam pelaksanaan ini terdapat salah satu indicator yang menjadikan penghambat dalam pelaksanaan perda ini, karena indicatornya menunjukkan dalam setiap pelaksanaan perda ini harus ada pengawasan yang maksimal dalam setiap pelaksanaannya, sehingga dapat terlaksanakan sesuai dengan skala pemerintah Kabupaten Bekasi, dan solusi untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan melaksanakan program sesuai dengan skala pemerintah dan harus adanya kerja sama antara Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja untuk melaksanakan peraturan daerah Kabupaten Bekasi tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengenai Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Dinas Sosial, Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja

ABSTRACT

Marni: “The Implementation of Social Welfare Implementation Policies in Bekasi Regency.

The 1945 law states that the goal of independence is to promote general welfare and to educate the nation's life. This welfare can restore the development of each community, especially those who still do not have employment placement facilities. Bekasi district is one of the areas in Indonesia with a level of social welfare that is not guaranteed for its people because of the employment placement facilities that have not been prioritized properly, this is due to the lack of cooperation between the social service and the manpower office in the Bekasi district. Therefore, the implementation of this welfare policy needs to be examined for the welfare of the community itself.

This study aims to determine the implementation of the government in the Bekasi Regency regional regulations regarding the implementation of social welfare, the government obstacles in the implementation of the Bekasi Regency regional regulations regarding the implementation of social welfare and to find out the government's solutions in dealing with obstacles to the implementation of social welfare.

The theory used in this study is to use the Merilee. S Grindle Model theory, which has several indicators used in the implementation of regional regulations in Bekasi district.

This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. The data sources used in this study are primary data and secondary data.

Based on the result of the above research, it can be concluded that, the implementation of regional regulation No 10 Tahun 2012 concerning the implementation of social welfare in Bekasi regency article 14 no 2 point G regarding this workforce placement facility can be carried out properly by using indicators contained in Merilee S. Grindle, the obstacle in this implementation is one indicator that becomes an obstacle in the implementation of this regional regulation, because this indicator shows in every implementation of the regulation in this area there must be maximum supervision in every implementation, so that it can be carried out according to the scale of the Bekasi regency government, and the solution to the obstacles in the implementation of this implementation regional regulation is by implementing programs according to the government scale and also the Social Service and the Manpower Office must work together to implement regulations Bekasi Regency area regarding Social Welfare Management regarding Workforce Placement Facilities.

Keywords: Policy Implementation, Social Service, Workforce Placement Facility